

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulgani, Ruslan. 1980. *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Mutiara.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bethan, Syamsuharya. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional : Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung: Alumni.
- Bintarto, R. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni, N. 1987. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat & Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bima Ilmu.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arief. 2009. *Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- MD, Moh. Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung: Refika.
- Soemardi, 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suriangingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwibowo, Dannawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *"Mimpi Negara Kesejahteraan"*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1982. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wahjono, Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind Hill.

Widjaja, H.A.W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Zainuddin, H. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Pembangunan Desa, dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

JURNAL

Alkadafi, M. 2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*, Jurnal El-Riyasah, 5(1), 32-40.

Suharto, Edy. 2011. *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes*. Jurnal Insan Akademis, Vol. 3, No. 1.

Harmiati, 2018. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, E-Journal Unihaz Bengkulu.

Heru Ribawanto, 2017. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, eJournal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Vol. 1, No. 6

Ridlwan, Z, 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

SUMBER LAIN

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Karangsalam. Pada tanggal 18 Juni 2020.

Hasil Wawancara dengan Ketua BUM Desa “Dekade Maju”. Pada tanggal 21 Juni 2020.

https://www.arahdestinasi.com/index.php/wisatadesa/read/516/desa_karangsalam_kembangkan_curug_telu, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas, di akses pada tanggal 2 November 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa, di akses pada tanggal 2 November 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Baturaden,_Banyumas, di akses pada tanggal 2 November 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangsalam,_Baturaden,_Banyumas, di akses pada tanggal 2 November 2019